

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.

Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinarycrime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Sering kita mendengar bahkan mungkin kita sudah tidak asing lagi tentang suatu tindak pidana yang erat sekali hubungannya dengan yang namanya pejabat pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni korupsi dan kenapa penulis bilang erat sekali hubungannya dengan pejabat pemerintah atau ASN karena merekalah yang mampu atau memiliki kemampuan melaksanakan tindak pidana korupsi. Korupsi menurut hukum positif yakni adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau korporasi. yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Di Indonesia cakupan korupsi memanglah sangat luas dibandingkan dengan negara - negara maju lainnya selain itu juga penerapan delik korupsi di Indonesia bukan hanya mengacu kepada hukum formil saja tetapi juga hukum secara materil sehingga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) juga bisa diterapkan sepanjang itu melanggar rasa keadilan masyarakat.

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan

---

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13

ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia. Tindak pidana korupsi tersebut sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, menyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Lebih lanjut, Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan :

---

<sup>3</sup> UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya :

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU KPK”) dengan sistem Operasi Tangkap Tangan;
5. Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan lain sebagainya.

Dalam pemberantasan korupsi, lembaga yang khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai Lembaga Peradilan yang khusus menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara Tindak pidana Korupsi yang jujur, adil, benar, bermartabat, dan berintegritas tinggi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pendiriannya diharapkan menjadi lembaga yang menghasilkan putusan yang berdasarkan hukum, Undang-Undang, kebenaran, dan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan keadilan bagi terdakwa itu sendiri, sehingga penegakan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya dengan tidak melanggar norma dan prinsip-prinsip keadilan.

Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum

didalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hokum yang jelaas dan disertai hati nurani hakim.

Penjatuhan pidana atau ppidanaan merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benaar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan ppidanaan. Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa namun tidak secara sewenang wenang menurut perasaan subjektifnya. Maksud pembentukan Undang-undang memakai system ini adalah untuk meberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai factor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Seperti dalam kasus posisi pada putusan No: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk terdakwa menyuruh saksi selaku Bendahara Daerah untuk memotong atas pembayaran yang diajukan oleh Bagiam Umum, bagiam Hukum, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan asset, Bagian administrasi pemerintahan Umum dan bagian Kesejahteraan Rakyat sehingga tekumpul uang sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Namum hakim dalam memutus perkara tersebut seolah meringankan masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan hanya menghitung besaran uang hasil pemotongan dari setiap bagian yang nilanya kurang dari Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah).

Dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Drs. RIJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si BIN H. JAMHURI BASNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaur dan diancam pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama erdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Melalui Putusan Nomor :22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk dalam putusanya menyatakan bahwa Terdakwa Drs. RIJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si BIN H. JAMHURI BASNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo pasal 12 A Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Rojikinnor Jamhuri Basni, M.Si Bin Jamhuri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis pada Putusan Nomor :22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PIK adalah Bahwa saksi yang tertangkap oleh KPK tidak ikut dijadikan sebagai terdakwa, Terdakwa pada Putusan tersebut adalah Sekretaris Daerah oleh karenanya dapat dikatakan penegakkan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak berjalan efektif sehingga tidak dapat menuntaskan pelaku pada kasus tersebut hingga pada akhirnya, serta Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan saksi dapat dikategorikan ikut serta dalam melakukan perbuatan dan membantu memperlancar perbuatan tindak pidana korupsi mengingat pada pasal 55 jo pasal 56 KUHP dan dipandang perbuatan berdiri sendiri. sehingga pada putusan tersebut perlu dipermasalahkan agar dapat memenuhi asas keadilan. serta adanya disparitas penjatuhan hukuman kepada terdakwa dinilai ringan dan tidak sesuai dengan bobot perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sesungguhnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mengandung aspek keadilan. Putusan Hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan. Dalam konteks penjerahan mengingat untuk mencapai cita cita bangsa yaitu pemberantasan tindak pidana



Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu penelitian dengan judul **“ANALISA PUTUSAN NOMOR: 22/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)?
2. Bagaimana Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari asas keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah

1. Untuk mengetahui dan mengkajipertimbangan hukum Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari asas keadilan

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

### **D.1. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.
3. Bagi Hakim, diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbang saran bagi hakim dalam melakukan pertimbangan sebelum memberikan amar putusan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN di masa yang akan datang.

4. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian bisa memberikan referensi terkait hal-hal yang bertentangan dengan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi yang juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat.

## **D.2. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif yakni; penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library reseach*), artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum juga doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan agar dapat menghasilkan suatu argumentasi, teori maupun suatu konsep baru sebagai suatu preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normatif mempunyai pengertian yang sama dengan penelitian doktrinal yakni penelitian yang di dasarkan pada bahan-bahan hukum yang mempunyai berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini diterapkan karena akan meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

## **3. Jenis Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:

1) Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk.

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);

3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU KPK”)

4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi literatur-literatur, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum, dan ensiklopedia yang dapat diakses melalui media internet berkaitan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12

dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, dan juga bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan melakukan "*library research*". Teknik *library reseach* adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari teknik memperoleh data ini dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan kaitannya dengan masalah yang diteliti, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka atau (*library research*), dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer yaitu melalui studi kepustakaan, serta juga mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- b. Mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu melalui berbagai literatur dan beberapa informasi yang dapat menunjang sehingga dapat membantu kaitannya dengan bahan hukum sekunder yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- c. Mengumpulkan bahan hukum tersier yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak berkompeten dari instansi terkait dan melakukan penelusuran internet.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji bahan hukum dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan bahan hukum dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan. Selanjutnya kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan akan membantu

mempermudah pemahaman isi dari penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal atau *das sollen* dan kenyataan *das seinyang* melatarbelakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan penulisan hukum ini.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab II ini berisikan uraian dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain teori tentang pertimbangan hakim, teori tentang tindak pidana korupsi, teori tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan teori tentang keadilan.

## **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab III ini berisikan mengenai uraian terutama terhadap pembahasan pada rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu tentang pertimbangan hukum Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan analisis Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plk tentang



tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari aspek keadilan.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dibahas dan dianalisis sebelumnya. Serta memberikan saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

